

IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SORONG

Arianti Mapadang¹, Muh. Ridha Suaib², Arie Purnomo³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong). 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kualitatif. Menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan yang di dapat dari para informan. Penganalisaan ini diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta,data dan informasi lalu dianalisis. sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Tehnik pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1) Secara umum Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan cukup baik. Dimana setiap tahapan hampir berjalan dengan lancar karena dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ada dalam ketentuan. Dan bila didasarkan oleh beberapa aspek pengukurnya maka di dapatkan hasil : a) Standart dan sasaran kebijakan. Pelaksanaannya sudah mulai mengikuti berbagai aturan atau standar yang . 2) Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran implementornya, komunikasi yang baik antar bagian di dalamnya, karakteristik dari tiap agen pelaksana, serta masyarakat yang memberikan respon yang cukup baik.Ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, yaitu menyangkut masalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan berbagai peralatan informatika yang dipergunakan selama implementasi. Kedua adalah kurang maksimal serta efisiennya sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal pula.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Administrasi, Kependudukan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Berbagai permasalahan ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan permasalahan baru di bidang kependudukan yang antara lain adalah : kemiskinan, kesehatan, pengangguran. Keselarasan jumlah penduduk yang besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Akan timbul permasalahan permasalahan menyangkut penduduk di sebuah negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang

relatif rendah. Kedua aspek itulah yang perlu dijaga keseimbangannya agar permasalahan-permasalahan tidak mudah mencuat dan mengganggu stabilitas pembangunan di suatu negara. Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peran yang sangatlah penting. Ini menuntut kerja keras para penyelenggara negara mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan yang baik untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan di Indonesia.

Tetapi hingga saat ini perolehan data kependudukan di Indonesia masih sangat tergantung pada hasil sensus dan survei atau data administrasi yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat agregat (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana jaringan pengaman sosial, bantuan untuk penduduk miskin, beasiswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan pembangunan dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi. Atas dasar pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi karena didasarkan pada basis internet maka dapat

dikumpulkan di satu titik yaitu *Internet Data Center*. Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Dimana masih banyak terdapat pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk. Seperti yang terdapat di ibukota Jakarta, ditemukannya berbagai identitas ganda dengan nomor identitas yang berbeda pula.

Menurut Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo,dkk (2017), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi di Kelurahan Malaweke belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan social ekonomi masyarakat Kelurahan. Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataannya alokasi tersebut lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan satu dengan lainnya dan dapat tercipta akselerasi pembangunan yang baik.

Sedangkan menurut Nur Iman Abdul Karim dkk (2017), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem ketenagakerjaan memiliki keleluasaan untuk tidak menerapkan hukuman, kasus-kasus kerja paksa pada umumnya memerlukan respon-respon penegakan hukum dan pidana yang cepat. Pengawas ketenagakerjaan memerlukan pengetahuan dan penilaian yang baik untuk dapat membedakan antara ketidakpatuhan yang serius atau disengaja atau pelanggaran yang tidak disengaja ataupun minor serta berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja ada dan tidak dapat dihilangkan, mengingat praktek prostitusi itu telah sama tuanya dengan kehidupan manusia sendiri. Sampai sekarang kebanyakan masyarakat yang menganggap dirinya suci, bersih, dan bermoral terus mengecam dan mencemooh para pelaku prostitusi itu dan berupaya untuk menghilangkannya.

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan Data Base penduduk. Dengan demikian pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan data base penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan

pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, Pemerintah Pusat dalam hal ini telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” atau disingkat SIAK. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong). 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kualitatif. Menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan yang di dapat dari para informan. Penganalisaan ini diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta,data dan informasi lalu dianalisis. sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Tehnik pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong)

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong yaitu dengan pertanyaan : 1) Menurut bapak sendiri apa itu sebenarnya SIAK ? (Jawab : “SIAK merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan untuk mengatasi semua masalah-masalah dibidang kependudukan, hingga terciptalah suatu suasana tertib administrasi. SIAK ini sendiri diharapkan dapat membantu untuk mengadakan pemetaan terhadap masyarakat Indonesia, sehingga juga nantinya dapat membantu jajaran pemerintah didalam pekerjaan lainnya.” 2) Apa yang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan SIAK ? (Jawab : “Pada dasarnya SIAK ini sendiri diadakan karena adanya Undang-undang No. 23 tahun 2006 yang mengatur tentang administrasi kendumukan. Di dalam Undangundang No. 23 tahun 2006 pasal 13 dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan. Dan untuk Kota Sorong sendiri SIAK di laksanakan dengan menggunakan Peraturan daerah No. 2 tahun 2009, yang di dalamnya juga mengatur mengenai penerbitan Nomor Induk Kependudukan. Dan

inilah yang menjadi dasar yang paling penting).” 3) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan SIAK dengan tujuan awalnya ? (Jawab : “Ya, seharusnya pelaksanaan SIAK ini dapat berjalan dengan tujuan awalnya. Akan tetapi seperti apa yang dipantau dan terjadi di lapangan tidak semua pelaksanaan dari kebijakan ini dapat berjalan seperti tujuan awalnya. Banyak terdapat hambatan dari berbagai hal yang membuat pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik. Dan dibalik itu semua semua pihak berusaha untuk membenahi dirinya agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien lagi).” 4) Apa-apa saja yang menjadi tahapan dalam implementasi SIAK tersebut ? (Jawab : “Tahapan implementasi SIAK ini dimulai dari yang pertama adalah sosialisasi yang dilakukan dinas kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi tujuan diadakannya SIAK, apa yang menjadi sasarannya dan berbagai informasi lainnya. Tahapan selanjutnya adalah masyarakat siap untuk mengisi formulir atau blanko data kependudukan yang telah disediakan di dinas. Untuk menghindari kebingungan yang dialami oleh masyarakat maka dinas menyediakan beberapa petugas yang siap membantu masyarakat yang kebingungan. Tahapan berikutnya adalah pemrosesan data tersebut untuk kemudian diinput kedalam pusat data kependudukan dan kemudian dihasilkanlah data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat).” 5) Apa-apa saja yang menjadi standar dalam pelaksanaan SIAK ini ? (Jawab : “Dalam hal ini pemerintah Kota Medan telah menetapkan standar pelayanan minimum untuk dinas kependudukan dan catatan sipil. Ini semua tertuang dalam peraturan yang ada, dan didalamnya terdapat mengenai berbagai standar pelayanan minimum, antara lain : 1) Standar pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, antara lain : a) Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK),b) Penerbitan Kartu Keluarga (KK),c) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP),d) Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS),e) Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT), f) Penerbitan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK),g) Penerbitan Surat Keterangan Ganti Nama (SKGN), h) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD), Universitas Sumatera Utara,i) Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP),j) Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). (2) Standar pelayanan perbitan dokumen hasil pencatatan sipil, antara lain : Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Lahir Mati, Pencatatan Perkawinan,Pencatatan Perceraian, Pencatatan Pengangkatan Anak,Pencatatan Akta Pengakuan Anak,Pencatatan Pengesahan Anak,Pencatatan Kematian,Pencatatan Perubahan Nama,Pencatatan Pelaporan Dan Tanda Bukti Peristiwa Penting Di Luar Negri. 6) Apakah

berbagai standar pelayanan minimum itu sudah dapat diterapkan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ? (Jawab : “Sejujurnya tidak semua pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ada. Banyak kendala yang ditemui di lapangan, yang tidak hanya berasal dari dinas tapi juga berasal dari masyarakat sendiri. Sebagai contoh, masyarakat yang ingin mengurus pembuatan KTP, akan tetapi data atau berkas yang diperlukan tidak dapat dilengkapi oleh masyarakat tersebut. Ini semua membuat standar pelayanan minimum tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik).” 7) Hambatan apa yang ditemui hingga pelaksanaan dari SIAK itu tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya ? (Jawab : “Hambatan yang paling sering dijumpai adalah pada sektor sumber daya. Sumber daya yang dimaksud baik dari sumber daya manusianya maupun dari berbagai peralatan yang dipergunakan. Dari sumber daya manusia adalah karena terbatasnya orang yang mampu mengoperasikan berbagai peralatan yang digunakan untuk proses pelaksanaan SIAK. Kalau dari peralatan adalah masih terbatasnya peralatan yang digunakan di dalam dinas. Jadi ini merupakan masalah yang bersangkutan paut antara keterbatasan peralatan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Disebabkan keterbatasan peralatan yang ada sehingga menjadikan alasan bagi pegawai untuk tidak meningkatkan kualitas dari sumber dayanya).” 8) Apakah ada upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut ? Jawab : “Tentunya kami berusaha agar setiap kekurangan dapat diatasi, mengenai sumber daya manusia kami mencoba mengatasi dengan memberi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, hingga dapat membantu jalannya SIAK. Sedangkan untuk peralatan, kami telah berusaha untuk menaikkan anggaran terhadap apa saja yang kami perlukan dalam menjalankan SIAK.” 9) Apakah manfaat yang diterima masyarakat dengan adanya SIAK ? Jawab : “Iya seharusnya banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat jika kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik. Sebagai salah satu contoh yang sangat jelas adalah pada saat masyarakat membuat KTP, jika sudah menggunakan SIAK maka dapat diselesaikan dengan kurun waktu 2 hari saja dan tidak dikenakan biaya sama sekali. Demikian juga dengan dokumen kependudukan yang lainnya. Disisi lain yang menjadi manfaatnya adalah data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini akan terkoneksi dengan dinas-dinas lain yang ada hubungannya dengan dinas bersangkutan. Sehingga memudahkan masyarakat jika memiliki urusan di dinas lain.”

Hambatan apa saja yang dialami dalam Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong

Standar dan sasaran kebijakan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa tahapan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik di Kota Sorong. Karena belum setiap tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur dalam petunjuk pelaksanaan. Tahapan pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh dinas belum dapat dikatakan maksimal. Jika dibandingkan dengan biaya operasional yang telah dianggarkan untuk sosialisasi maka dapat dikatakan kegiatan ini belum maksimal. Hal ini didukung dengan keadaan nyata dimasyarakat, bahwa belum semua masyarakat yang memahami apa itu SIAK serta apa itu kegunaannya. Maka dari itu untuk tahapan pertama dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Keberhasilan ataupun kekurangan dalam setiap tahapan program ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Implementasi SIAK selanjutnya. Kelancaran pelaksanaan setiap tahapan implementasi SIAK tidak terlepas dari peran dan juga kerjasama antar pihak pelaksana dan juga masyarakat. Sasaran Implementasi SIAK ini adalah pencapaian tertib administrasi. Tertib administrasi yang dimaksud adalah setiap warga negara yang telah dianggap dewasa atau cukup umur, memiliki identitas yang resmi dan terdaftar di Depdagri. Serta setiap peristiwa kependudukan yang ada di Kota Medan di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini mengindikasikan bahwa sasaran dari program ini belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan tujuannya.

Sumber daya

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan serta melihat kenyataan yang ada di lapangan maka dapat dinyatakan bahwa sumber daya baik dana, peralatan dikategorikan sudah baik. Dapat dilihat dari ketersediaan peralatan (sarana dan prasarana) yang digunakan selama proses implementasi SIAK telah ada dan dalam kondisi yang baik. Baik dana yang dibutuhkan telah dianggarkan dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah. Demikian juga dengan sumber daya manusia yang melaksanakan program itu dimulai dari proses sosialisasi, hingga tahap akhir juga dapat dikatakan baik. Hanya saja masih tetap terus dilakukan pembenahan agar dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat. Sumber daya harus tetap mendapat pelatihan dan penambahan personil yang berkompeten dibidangnya.

Komunikasi

Komunikasi antar pelaksana implementasi SIAK dapat dilihat dari bagaimana koordinasi dan juga kerja sama antar pelaksana. Dan secara umum komunikasi antar pelaksana dapat dikatakan sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar. Dimana antar pihak saling memberikan informasi, masukan dan juga sering terlibat dalam pembahasan permasalahan yang menyangkut implementasi SIAK. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam implementasi SIAK sudah menunjukkan komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang lancar. Dimana ada kejelasan, pihak mana yang harus melapor pada siapa, serta bagaimana koordinasi dan kerjasama untuk memberikan pelayanan yang baik dalam bidang administrasi kependudukan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, serta ketepatan atau kesesuaian pelaksanaan SIAK dengan berbagai ketentuan yang telah diatur. Secara umum bahwa struktur pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Sorong sebenarnya bersifat sederhana. Yaitu program ini dijalankan secara langsung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong sendiri, maka tanggung jawab penuh pelaksanaan di pegang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Sikap masyarakat

Berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap sebuah kebijakan maka sikap masyarakat Kota Medan terhadap implementasi SIAK pada awalnya bermacam-macam. Masyarakat yang pada awalnya sudah mendengar sekilas tentang program ini menyambut dengan baik, karena mereka akan mendapatkan berbagai kemudahan dengan adanya kebijakan ini. Ada juga masyarakat yang sama sekali tidak tahu bahkan cukup bingung ketika kebijakan ini diterapkan. Mereka belum memahami betul apa yang menjadi tujuan dan manfaatnya bagi diri mereka. Bahkan ada masyarakat yang menyambut dengan buruk, mereka merasa bahwa program ini akan sama saja dengan program lainnya berakhir buruk dan yang lebih parah lagi sama sekali tidak dapat diterapkan. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa respon masyarakat terhadap Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Sorong adalah baik dan berjalan dengan lancar. Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan

bahwa sekarang ini masyarakat sudah menyambut dengan baik semua kebijakan pemerintah karena membawa dampak positif bagi diri mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ; 1) Secara umum Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah berjalan dengan cukup baik. Dimana setiap tahapan hampir berjalan dengan lancar karena dilakukan dengan mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ada dalam ketentuan. Dan bila didasarkan oleh beberapa aspek pengukurnya maka di dapatkan hasil : a) Standart dan sasaran kebijakan. Pelaksananya sudah mulai mengikuti berbagai aturan atau standar yang berlaku, walaupun masih ditemukan ada beberapa kekurangan. Standar pelaksanaan sebaiknya di fokuskan pada tahapannya yaitu ; standar pelayanan minimum, dan standar penerbitan dokumen. b) Sumber daya. Didalam pelaksanaan siak ini banyak yang diperlukan baik sumber daya manusia, maupun barang-barang atau benda, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dana. Untuk proses implementasi program ini sudah memiliki anggaran tersendiri. c) Komunikasi. Di dalam proses implementasi ini terdapat dua jenis komunikasi yaitu internal dan eksternal. Keduanya memiliki peranan yang cukup penting. Tetapi dari kesemuanya itu komunikasi yang dibentuk kepada masyarakat merupakan yang terutama, dikarenakan masyarakat merupakan objek dari kebijakan ini. d) Karakteristik agen pelaksana. Seharusnya didalam melaksanakan suatu program yang telah dirancang adalah orang yang mengerti secara detail tentang program tersebut. Dan pada pelaksanaannya adalah orang yang terlibat dalam proses implementasi merupakan orang yang sudah mendapatkan pelatihan tentang tugas yang akan dipikulnya. e) Sikap masyarakat. Kondisi masyarakat dengan tingkat kesibukan yang tinggi membuat proses penerapannya berjalan sedikit terhambat, baik pada proses sosialisasi maupun pada proses penerapan secara langsung. Akan tetapi lambat laun masyarakat mulai sadar akan pentingnya dan manfaat dari program ini. 2) Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran implementornya, komunikasi yang baik antar bagian di dalamnya, karakteristik dari tiap agen pelaksana, serta masyarakat yang memberikan respon yang cukup baik. Ada beberapa kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, yaitu menyangkut masalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan berbagai peralatan

informatika yang dipergunakan selama implementasi. Kedua adalah kurang maksimal serta efisiennya sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. : Yayasan Pancur Siwah. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. :Rineka Cipta. Jakarta
- Hadari, Nawawi. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. : Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Karim, N. I. A., Amiruddin, A., & Ena, N. (2017). ANALISIS ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA HIBURAN MALAM DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL KOTA SORONG. *Gradual*, 6(2), 1-11.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. : Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Prasetyo, Z. N. D., Pabalik, D., & Bintari, W. C. (2017). IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MALAWELE KABUPATEN SORONG. *Gradual*, 6(2), 42-53.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survai*. : LP3ES. Jakarta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.: Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*.: Alfabeta. Bandung
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.: Prenada Media. Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*.: Lukman Offset YPAPI. Yogyakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset YPAPI. Yogyakarta
- Thomas, R. Dey. 2003. Analisis Kebijakan Publik. LP3S. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta

Wahab, Solichin A. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. : UMM Press. Malang